

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2012



KEMENTERIAN PERTANIAN

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN

2012

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan INPRES Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi, salah satu kegiatan yang harus dilakukan adalah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Tahun 2012 merupakan penjabaran dari Renstra Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian 2010 – 2012. RKT Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Tahun 2012 memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi untuk mencapai tujuan program dan kegiatan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian tahun 2012.

Dengan disusunnya RKT Tahun 2012 diharapkan dapat memandu pelaksanaan tugas dan fungsi serta meningkatkan kinerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian.

Jakarta, Maret 2012

a.n Kepala Badan,

Dr. Ir. Edi Abdurachman, MS, MSc

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
PENDAHULUAN.....	3
BAB II. ARAH DAN KEBIJAKAN TAHUN 2012	8
2.1. Visi	8
2.2. Misi	8
2.3. Tujuan dan Sasaran	9
2.4. Arah Kebijakan	11
2.5. Strategi	12
BAB III. PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2012	14
3.1. Program dan Kegiatan	14
3.1.1. Program.....	14
3.1.2. Kegiatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian	14
PENUTUP	22

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Isu strategis yang kini sedang dihadapi dunia adalah perubahan iklim global, terjadi krisis pangan dan energi dunia, harga pangan dan energi meningkat, sehingga negara-negara yang semula menjadi pengeksport pangan cenderung menahan produknya dijadikan stok pangan. Kondisi global tersebut juga terjadi di Indonesia, sehingga diperlukan upaya-upaya guna mengamankan produk dan meningkatnya stok pangan nasional. Isu strategis nasional lainnya mengenai laju pertumbuhan penduduk yang masih tinggi, tingginya laju konversi lahan, terbatasnya infrastruktur pertanian serta pola pangan penduduk yang bergantung pada beras.

Pada tahun 2012 pertanian di Indonesia masih dihadapkan pada tantangan berat antara lain: (1) dampak perubahan iklim pada sektor pertanian berupa: meningkatnya serangan OPT dan penyakit hewan, menurunnya produktivitas dan menurunnya kualitas hasil panen, (2) meningkatnya harga pangan yang berkorelasi pada tingkat inflasi dan tingkat kemiskinan, (3) ketersediaan produksi kedelai, gula dan daging dalam negeri dan internasional terbatas, di sisi lain kebutuhan konsumsi domestik untuk ketiga komoditas tersebut meningkat, (4) kenaikan impor bahan pangan dan pakan akan mengurangi devisa negara, (5) terbatasnya pembiayaan pertanian yang mudah diakses petani/peternak, (6) terbatasnya infrastruktur lahan dan air, (7) sistem penyuluhan pertanian yang belum efektif, dan (8) belum optimalnya peran dan dukungan pemerintah daerah.

Dari sisi pembangunan ekonomi nasional, bukti empiris menunjukkan bahwa sektor pertanian memiliki peran penting terhadap ekonomi nasional, yang dapat dilihat dari kontribusi terhadap produk domestik bruto, penyerap tenaga kerja, neraca perdagangan, penyedia bahan pangan, bahan energi, pakan dan bahan baku industri, serta sumber pendapatan masyarakat di pedesaan. Besarnya peran dalam perekonomian nasional tersebut ternyata belum dapat dinikmati secara proporsional oleh para pelaku usaha pertanian sesuai kontribusinya.

Terkait dengan manajemen pembangunan nasional, dalam era reformasi dan otonomi daerah, pemerintah terus melakukan perubahan sesuai perkembangan jaman, antara lain berupa reformasi manajemen keuangan

negara, reformasi birokrasi maupun reformasi dalam sistem perencanaan dan penganggaran. Kementerian Pertanian telah menindaklanjuti berbagai reformasi tersebut serta mengakomodasi kondisi yang ada, mengimplementasi program dan kegiatan di lapangan, guna memenuhi tuntutan peningkatan kinerja dalam mewujudkan hasil pembangunan sesuai dengan rencana, layanan berkualitas, dan pemanfaatan sumberdaya.

Dalam rangka membangun ekonomi wilayah, terlihat bahwa peran sektor pertanian sangat strategis dan memiliki kaitan kuat di hulu maupun hilir dibandingkan dengan sektor lainnya. Peran strategis tersebut perlu dioptimalkan sejalan dengan strategi pemerintah membangun enam Koridor Pengembangan Ekonomi Indonesia (KPEI). Peran strategis sektor pertanian tentunya harus difahami bersama-sama sehingga mampu mendorong partisipasi masyarakat dan swasta. Dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta dihadapkan pada berbagai kendala, untuk itu dalam rangka pemberdayaan masyarakat tidak saja memerlukan pendekatan teknis seperti yang telah diterapkan selama ini, tetapi juga pendekatan sosial budaya yang mampu merangsang perubahan sikap dan pola kerja, melalui pemilihan kegiatan yang benar-benar dapat memicu pembangunan pertanian.

Dalam meningkatkan peran sektor pertanian sebagai penghela pembangunan ekonomi nasional, Kementerian Pertanian telah menetapkan visi pembangunan pertanian 2010 - 2014, yaitu **“Terwujudnya pertanian industrial unggul berkelanjutan yang berbasis sumberdaya lokal untuk meningkatkan kemandirian pangan, nilai tambah, daya saing, ekspor, dan kesejahteraan petani”**. Target utama visi pembangunan pertanian ditujukan untuk mewujudkan empat sukses pembangunan pertanian, yaitu: 1) pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan, 2) peningkatan diversifikasi pangan, 3) peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor, serta 4) peningkatan kesejahteraan petani.

Dalam rangka mewujudkan empat sukses pembangunan pertanian tersebut, diperlukan dukungan ketersediaan sumberdaya manusia pertanian yang profesional, kreatif, inovatif, dan berwawasan global. Dukungan tersebut dilakukan melalui pemantapan sistem penyuluhan, pemantapan sistem pelatihan, revitalisasi sistem pendidikan, standarisasi

dan sertifikasi profesi pertanian serta pemantapan sistem pelayanan administrasi dan pelayanan teknis.

Pemantapan dan revitalisasi sistem tersebut ditujukan untuk: 1) menumbuhkembangkan kelembagaan penyuluhan, kelembagaan petani dan usaha tani; 2) meningkatkan kapasitas aparatur pertanian dan kompetensi non aparatur pertanian melalui penyuluhan, pelatihan, pendidikan, standarisasi dan sertifikasi profesi pertanian; 3) mengembangkan kelembagaan penyuluhan, pelatihan, dan pendidikan pertanian baik milik pemerintah maupun masyarakat; serta 4) meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan pelayanan teknis.

Selanjutnya berkaitan dengan aspek pengelolaan kinerja instansi, telah dibangun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya pelaksana kebijakan dan program berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Di dalam SAKIP terdapat komponen-komponen yang harus dipenuhi antara lain: proses penyusunan rencana strategis, penyusunan rencana kinerja, penetapan kinerja, pengukuran dan pelaporan kinerjanya.

Dalam SAKIP terdapat dokumen perencanaan yang mempunyai keterkaitan yang sangat erat, antara rencana strategis, rencana kinerja dan penetapan kinerja. Renstra memberikan arah pembangunan organisasi jangka menengah, sedangkan rencana kinerja dan penetapan kinerja merupakan target dan komitmen kinerja yang akan diwujudkan pada suatu tahun tertentu. Rencana kinerja merupakan penjabaran dari renstra, memuat seluruh rencana atau target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun yang dituangkan dalam sejumlah indikator kinerja strategis yang relevan. Selanjutnya rencana kinerja yang telah disesuaikan dengan ketersediaan alokasi anggaran dituangkan dalam suatu penetapan kinerja. Penetapan kinerja akan dipertanggungjawabkan capaian kinerjanya dalam LAKIP.

Dalam rangka perencanaan kinerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian pada TA.2012, maka disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Tahun 2012.

1.2. Maksud dan Tujuan

RKT Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Tahun 2012 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis dan acuan dalam penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaksanaan kinerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah:

- a. Menyusun RKT Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Tahun 2012;
- b. Menyediakan arahan penyusunan Penetapan Kinerja (PK) Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Tahun 2012;
- c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian.

1.3. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dari RKT Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian tahun 2012 adalah:

- a. Tersusunnya RKT Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Tahun 2012;
- b. Tersedianya arahan penyusunan PK Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Tahun 2012;
- c. Meningkatnya efisiensi, efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian.

1.4. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RKT Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian tahun 2012 adalah:

- a. Peraturan pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah
- b. Instruksi presiden republik indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

- c. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan Pemberantasan Korupsi
- d. Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- e. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
- f. Peraturann Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama
- g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kineja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

BAB II.

ARAH DAN KEBIJAKAN TAHUN 2012

2.1. Visi

BPPSDMP memiliki tugas melaksanakan penyuluhan dan pengembangan sumberdaya manusia pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPPSDMP menyelenggarakan fungsi: a) penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standardisasi dan sertifikasi sumberdaya manusia pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b) pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standardisasi dan sertifikasi sumberdaya pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan; c) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standardisasi dan sertifikasi sumberdaya manusia pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan; serta d) pelaksanaan administrasi BPPSDMP.

Sesuai tugas dan fungsi, potensi, capaian hasil pada periode sebelumnya, permasalahan, dan tantangan yang ada, BPPSDMP pada periode 2010-2014 menetapkan visi, yaitu **“Terwujudnya sumberdaya manusia pertanian yang profesional, kreatif, inovatif dan berwawasan global dalam rangka meningkatkan kemandirian pangan, nilai tambah, ekspor, dan kesejahteraan petani.”**

2.2. Misi

Untuk mewujudkan visi di atas, BPPSDMP menetapkan misi sebagai berikut.

- 1) Memantapkan sistem penyuluhan pertanian yang komprehensif dan terpadu.
- 2) Memantapkan sistem pelatihan pertanian yang berbasis kompetensi.
- 3) Merevitalisasi sistem pendidikan, standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian yang kredibel.
- 4) Memantapkan sistem administrasi dan manajemen yang transparan dan akuntabel.

2.3. Tujuan dan Sasaran

Sejalan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, tujuan yang hendak dicapai BPPSDMP adalah sebagai berikut.

- 1) Menumbuhkembangkan kelembagaan petani untuk meningkatkan kompetensi dan kemandirian petani.
- 2) Meningkatkan kompetensi kerja aparatur dan kompetensi non aparatur pertanian.
- 3) Menghasilkan aparatur dan non aparatur yang kompeten dan tersertifikasi.
- 4) Meningkatkan pelayanan, tata kelola administrasi dan manajemen yang efektif, efisien dan akuntabel.

Sasaran yang ingin dicapai Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian tahun 2012 adalah meningkatkan kemampuan, kompetensi, kemandirian, dan daya saing SDM pertanian melalui program pengembangan SDM pertanian dan kelembagaan petani, untuk mendukung empat sukses pembangunan, dengan indikator :

- 1) Meningkatnya kompetensi aparatur di sektor pertanian
- 2) Meningkatnya kapasitas non aparatur di sektor pertanian
- 3) Meningkatnya kinerja ketenagaan penyuluhan
- 4) Meningkatnya kapasitas aparatur fungsional pertanian
- 5) Tersedianya tenaga teknis menengah dan calon wirausahaan muda di sektor pertanian
- 6) Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintah

Sasaran Badan tersebut lebih lanjut dijabarkan pada masing-masing kegiatan disajikan pada Tabel :

No.	Kegiatan
1	Revitalisasi Pendidikan Pertanian, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian
1.1	Meningkatkan kualitas SDM pertanian melalui standardisasi dan sertifikasi profesi
1.2	Meningkatkan kualitas kelembagaan pendidikan pertanian
1.3	Meningkatkan kualitas lulusan pendidikan pertanian (pendidikan kedinasan dan tugas belajar)
2	Pengembangan Pendidikan Pertanian
2.1	Meningkatnya tingkat pendidikan menengah pertanian
3	Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian
3.1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas kelembagaan pelatihan pertanian
3.2	Meningkatnya kualitas aparatur dan non aparatur pertanian
3.3	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat di daerah tertinggal (READ Program)
4	Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian
4.1	Meningkatnya kualitas kelembagaan penyuluhan pertanian pemerintah
4.2	Meningkatnya jumlah kelembagaan petani
4.3	Meningkatnya kualitas program dan materi penyuluh pertanian
4.4	Meningkatnya kualitas dan kuantitas ketenagaan penyuluh pertanian
4.5	Meningkatkan mutu penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang dikelola oleh petani (FEATI)
5	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya
5.1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi dan manajemen organisasi PPSDMP melalui pemantapan sistem perencanaan, pengelolaan keuangan dan perlengkapan, monitoring dan evaluasi serta ketatalaksanaan, kepegawaian dan ketatausahaan

2.4. Arah Kebijakan

Arah kebijakan Kementerian Pertanian tahun 2010 – 2014 difokuskan dalam mencapai empat sasaran strategis pembangunan pertanian, yaitu:

- 1) pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan;
- 2) peningkatan diversifikasi pangan;
- 3) peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor; serta
- 4) peningkatan kesejahteraan petani.

Selanjutnya, dalam rangka percepatan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia, Pemerintah telah menetapkan tiga strategi utama pembangunan ekonomi nasional, yaitu: 1) mengembangkan koridor ekonomi Indonesia; 2) memperkuat konektivitas nasional; serta 3) mempercepat kemampuan iptek nasional.

Khusus untuk pengembangan koridor ekonomi Indonesia, Pemerintah telah menetapkan enam Pembangunan Koridor Ekonomi (PKE) yang memiliki fungsi strategis untuk menghasilkan dampak ekonomi nasional khususnya industri unggulan daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dari 5,3% menjadi 7% per tahun. Enam KPE tersebut adalah koridor: (a) Sumatera sebagai Sentra Produksi dan Pengolahan Hasil Bumi dan Lumbung Energi Nasional; (b) Jawa sebagai pendorong Industri dan jasa nasional; (c) Kalimantan sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil tambang dan lumbung energi nasional; (d) Sulawesi dan Maluku Utara sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan nasional; (e) Bali dan Nusa Tenggara sebagai pintu gerbang pariwisata dan pendukung pangan nasional, (f) Papua dan Maluku sebagai pusat pengolahan sumberdaya alam yang melimpah dan SDM yang sejahtera.

Kementerian Pertanian menindaklanjuti pengembangan enam koridor ekonomi tersebut, dengan mengarahkan pembangunan pertanian pada masing-masing koridor ekonomi sebagai berikut: (a) Sumatera sebagai Sentra Produksi Kelapa Sawit dan Karet; (b) Jawa sebagai Sentra Pengembangan Industri Makanan/Pangan; (c) Kalimantan sebagai Sentra Produksi Kelapa Sawit dan Karet; (d) Sulawesi sebagai Pusat Produksi Beras, Singkong, Jagung dan Kakao; (e) Bali-NTB-NTT sebagai Sentra Produksi Jagung, Kedelai; (f) Papua sebagai Sentra Produksi Pangan dan Perkebunan.

Mengacu pada arah kebijakan Kementerian Pertanian dan enam koridor utama di atas, maka kebijakan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian diarahkan pada:

1. Pemantapan sistem penyuluhan pertanian untuk meningkatkan kompetensi penyuluh yang bersifat polivalen di tingkat desa dan spesialis di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan pusat.
2. Penempatan satu penyuluh satu desa untuk mendukung komoditas unggulan.
3. Pemantapan sistem pelatihan pertanian berbasis kompetensi dan mendukung pencapaian target utama pembangunan pertanian.
4. Penguatan kelembagaan pelatihan pertanian pemerintah dan kelembagaan pelatihan petani sebagai pusat pembelajaran yang andal dan mandiri.
5. Pengembangan kualitas pendidikan tinggi kedinasan pertanian yang mampu menghasilkan tenaga fungsional RIHP dan tenaga Karantina Pertanian yang profesional dan kompeten.
6. Meningkatkan kualitas pendidikan menengah pertanian yang mampu menghasilkan tenaga teknis pertanian tingkat menengah dan wirausahawan muda pertanian.
7. Mengembangkan sistem standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian untuk memenuhi kebutuhan SDM pertanian yang profesional dan kompeten.
8. Pemantapan sistem administrasi dan manajemen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih.

2.5. Strategi

Mengacu pada strategi pembangunan pertanian, serta arah kebijakan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian, maka strategi untuk mencapai visi dan misi BPPSDMP pada periode 2010-2014 adalah sebagai berikut.

1. Penataan dan penguatan kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan petani mulai dari tingkat desa sampai tingkat pusat.

2. Pengembangan program dan sistem informasi penyuluhan pertanian yang mendukung empat sukses pembangunan pertanian serta antisipasi perubahan iklim dan kelestarian lingkungan.
3. Penataan serta peningkatan jumlah dan kompetensi penyuluh pertanian melalui optimalisasi peran Penyuluh PNS, Penyuluh Swadaya, dan Penyuluh Swasta.
4. Penataan dan pengembangan usaha tani yang mandiri dan berdaya saing.
5. Penataan serta peningkatan kompetensi THL TB Penyuluh Pertanian.
6. Peningkatan jumlah dan kompetensi ketenagaan pelatihan pertanian yang profesional dan kredibel.
7. Peningkatan jumlah dan mutu penyelenggaraan pelatihan aparatur dan non aparatur pertanian.
8. Peningkatan jumlah dan mutu sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan pertanian.
9. Akreditasi kelembagaan pelatihan pertanian pemerintah dan pelatihan petani (P4S).
10. Restrukturisasi kelembagaan dan pengembangan program studi pendidikan tinggi kedinasan pertanian.
11. Pengembangan kelembagaan pendidikan menengah kejuruan pertanian.
12. Penumbuhkembangan wirausahawan muda di bidang pertanian.
13. Pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang pertanian.
14. Pengembangan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) bidang pertanian.
15. Pemantapan tata kelola organisasi dan kepegawaian.
16. Pemantapan sistem perencanaan.
17. Pemantapan sistem pengelolaan keuangan dan perlengkapan.
18. Pemantapan sistem pengendalian, evaluasi, pelaporan, dan kehumasan.

BAB III.

PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2012

3.1. Program dan Kegiatan

3.1.1. Program

Untuk melaksanakan strategi penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian pada periode 2010-2014, telah ditetapkan program dengan nomenklatur “**Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian dan Kelembagaan Petani**”.

3.1.2. Kegiatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian

Implementasi dari program BPPSDMP tersebut dilakukan melalui lima kegiatan yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

No.	Kegiatan
1	Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian
	1.1 Pengembangan Program dan Informasi Penyuluhan Pertanian
	a. Penyusunan program dan pengembangan program penyuluhan
	b. Pengembangan program kerja Pusat Penyuluhan Pertanian
	c. Fasilitasi penyelesaian peraturan perundang-undangan
	d. Penyusunan dan penyebaran materi penyuluhan pertanian
	e. Apresiasi sistem informasi penyuluhan pertanian
	f. Evaluasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian
	g. Pengembangan kerjasama dalam dan luar negeri
	h. Pengadaan perlengkapan alat pengolah data penyuluhan pertanian
2	
	2.1 Meningkatnya tingkat pendidikan menengah pertanian
3	Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian
	3.1 Meningkatnya kualitas dan kuantitas kelembagaan

			pelatihan pertanian
		3.2	Meningkatnya kualitas aparatur dan non aparatur pertanian
		3.3	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat di daerah tertinggal (READ Program)
4		Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian	
		4.1	Meningkatnya kualitas kelembagaan penyuluhan pertanian pemerintah
		4.2	Meningkatnya jumlah kelembagaan petani
		4.3	Meningkatnya kualitas program dan materi penyuluh pertanian
		4.4	Meningkatnya kualitas dan kuantitas ketenagaan penyuluh pertanian
		4.5	Meningkatkan mutu penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang dikelola oleh petani (FEATI)
5		Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	
		5.1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi dan manajemen organisasi PPSDMP melalui pemantapan sistem perencanaan, pengelolaan keuangan dan perlengkapan, monitoring dan evaluasi serta ketatalaksanaan, kepegawaian dan ketatausahaan

- 1) Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian.
- 2) Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian.
- 3) Revitalisasi Sistem Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian, serta Pengembangan Pendidikan Menengah Pertanian.

4) Dukungan Administrasi Manajemen dan Teknis Lainnya.

3.1.2.1. Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian

Kegiatan pemantapan sistem penyuluhan pertanian meliputi: pengembangan program dan informasi penyuluhan pertanian; pengembangan kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan pertanian; pemberdayaan kelembagaan petani dan usahatani; serta P3TIP/FEATI.

3.1.2.1.1. Pengembangan Program dan Informasi Penyuluhan Pertanian

Pengembangan Program dan Informasi Penyuluhan Pertanian terdiri atas:

- a) Penyusunan program dan pengembangan program penyuluhan.
- b) Pengembangan program kerja Pusat Penyuluhan Pertanian.
- c) Fasilitasi penyelesaian peraturan perundang-undangan.
- d) Penyusunan dan penyebaran materi penyuluhan pertanian.
- e) Apresiasi sistem informasi penyuluhan pertanian.
- f) Evaluasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian.
- g) Pengembangan kerjasama dalam dan luar negeri.
- h) Pengadaan perlengkapan alat pengolah data penyuluhan pertanian.

3.1.2.1.2. Pengembangan Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian

Pengembangan Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian akan difokuskan pada hal-hal sebagai berikut:

- Pengembangan data base dan profil kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan pertanian.
- Fasilitasi Pemberdayaan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- Pemberdayaan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- Fasilitasi Pemberdayaan THL-TB Penyuluh Pertanian.
- Fasilitasi Pengembangan Profesionalisme Penyuluh Pertanian.
- Fasilitasi Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Swadaya/Swasta.
- Fasilitasi Komisi Penyuluhan Pertanian.

3.1.2.1.3. Pemberdayaan Kelembagaan Petani dan Usahatani

Pemberdayaan Kelembagaan Petani dan Usahatani diarahkan pada kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- Pengembangan Data dan Profil Kelembagaan Petani dan Usahatani.
- Fasilitasi Pemberdayaan Kelembagaan Petani dan Usahatani.
- Apresiasi Manajemen Agribisnis bagi Gapoktan.
- Pengembangan Gapoktan menjadi Kelembagaan Ekonomi Perdesaan.
- Fasilitasi Pengembangan Usahatani kelompok Berbasis Komoditas Unggulan Perdesaan.

3.1.2.1.4. Penyelenggaraan penyuluhan yang dikelola oleh petani akan difokuskan pada lokasi-lokasi *Farmer Empowerment Through Agricultural Technology and Informastion* (FEATI Project).

3.1.2.2. **Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian**

Kegiatan pemantapan sistem pelatihan pertanian meliputi: pemantapan kelembagaan pelatihan pertanian; peningkatan ketenagaan pelatihan pertanian; peningkatan penyelenggaraan pelatihan pertanian; pengembangan program dan kerjasama pelatihan pertanian; serta READ.

3.1.2.2.1. Pemantapan Kelembagaan Pelatihan Pertanian

Pemantapan Kelembagaan Pelatihan Pertanian diarahkan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- Penataan kelembagaan pelatihan pertanian pusat dan daerah serta akreditasi program pelatihan pertanian.
- Penataan dan klasifikasi kelembagaan P4S.
- Pengembangan sarana dan prasarana pelatihan.

3.1.2.2.2. Peningkatan Ketenagaan Pelatihan Pertanian

Peningkatan Ketenagaan Pelatihan Pertanian meliputi kegiatan:

- Peningkatan profesionalisme widyaiswara dan tenaga teknis kediklatan.
- Peningkatan kompetensi instruktur P4S.

3.1.2.2.3. Peningkatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian

Peningkatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian difokuskan pada kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- Pengembangan pedoman dan materi pelatihan yang mendukung 4 (empat) sukses pembangunan pertanian
- Pengembangan pelatihan teknis agribisnis, kewirausahaan, fungsional dan struktural bagi penyuluh PNS, RIHP non penyuluh, pejabat dan petugas lainnya lingkup pertanian berbasis kompetensi kerja.
- Pengembangan pelatihan dan permagangan teknis agribisnis dan kewirausahaan berbasis kompetensi bagi penyuluh swadaya, instruktur/pengelola P4S, pengurus Gapoktan dan kelembagaan petani lainnya.
- Evaluasi penyelenggaraan pelatihan pertanian yang berkesinambungan.

3.1.2.2.4. Pengembangan Program dan Kerjasama Pelatihan Pertanian

Kegiatan-kegiatan yang akan dikembangkan melalui Pengembangan Program dan Kerjasama Pelatihan Pertanian sebagai berikut:

- Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pelatihan pertanian dengan instansi terkait di pusat dan daerah.
- Pengiriman widyaiswara/tenaga ahli, petani dan penyelenggaraan pelatihan pertanian dalam kerangka kerjasama dan membangun jejaring kerja dalam dan luar negeri (bilateral, regional, dan multilateral).

3.1.2.2.5. Pemberdayaan masyarakat dan pembangunan pertanian perdesaan dikembangkan melalui *Rural Empowerment and Agricultural Development Program* (Program READ).

3.1.2.3. Revitalisasi Sistem Pendidikan serta Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian, serta Pengembangan Pendidikan Menengah Pertanian.

3.1.2.3.1. Revitalisasi Sistem Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian

Kegiatan pengembangan pendidikan, standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian meliputi: peningkatan kualitas pendidikan pertanian;

pengembangan program dan kerjasama pendidikan pertanian; serta pengembangan standardisasi dan sertifikasi profesi.

3.1.2.3.1.1. Peningkatan Kualitas Pendidikan Pertanian

Peningkatan Kualitas Pendidikan Pertanian akan diarahkan pada kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- Pengembangan Kelembagaan Pendidikan Pertanian.
- Pengembangan Ketenagaan Pendidikan Pertanian
- Pengembangan Penyelenggaraan Pendidikan Pertanian.
- Pengembangan pendidikan S2 dan S3 bagi Aparatur Pertanian.

3.1.2.3.1.2. Pengembangan Program dan Kerjasama Pendidikan Pertanian

Pengembangan Program dan Kerjasama Pendidikan Pertanian meliputi kegiatan sebagai berikut:

- Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pendidikan pertanian dengan instansi terkait di pusat dan daerah.
- Pengembangan kerjasama pendidikan, standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian dengan berbagai institusi dalam dan luar negeri.

3.1.2.3.1.3. Pengembangan Standardisasi dan Sertifikasi Profesi

Kegiatan – kegiatan dalam rangka Pengembangan Standardisasi dan Sertifikasi Profesi meliputi:

- Pembentukan dan pengembangan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) bidang pertanian.
- Fasilitasi calon asessor kompetensi bidang pertanian.
- Akreditasi UPT Pelatihan Pertanian Pusat untuk menjadi Lembaga Diklat Profesi (LDP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- Penyusunan SKKNI bidang pertanian dan harmonisasi dengan standar kompetensi kerja internasional.

3.1.2.3.2. Pengembangan Pendidikan Menengah Pertanian

Kegiatan pengembangan pendidikan menengah pertanian meliputi: penyelenggaraan pendidikan pertanian; pengembangan program dan kerjasama pendidikan pertanian; serta pengembangan kelembagaan dan ketenagaan.

3.1.2.3.2.1. Pengembangan Program dan Kerjasama Pendidikan Menengah Pertanian
Pengembangan Program dan Kerjasama Pendidikan Menengah Pertanian terdiri atas:

- Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pendidikan menengah pertanian
- Pengembangan kerja sama dengan instansi terkait, dunia usaha dan industri, baik di dalam dan luar negeri.

3.1.2.3.2.2. Penataan Kelembagaan Pendidikan

Penataan Kelembagaan Pendidikan difokuskan pada kegiatan – kegiatan sebagai berikut:

- Pengembangan SMK-PP menjadi Rintisan SMK-PP bertaraf internasional.
- Penyesuaian nomenklatur SPP menjadi Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMK-PP).
- Standardisasi sarana dan prasarana pendidikan pertanian di SMK-PP.
- Pengembangan unit usaha agribisnis di Rintisan SMK-PP bertaraf internasional.
- Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di SMK-PP.

3.1.2.3.2.3. Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Pertanian

Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Pertanian dikembangkan melalui kegiatan sebagai berikut:

- Peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan pertanian di SMK-PP berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP).
- Fasilitasi Pertukaran Siswa dan Magang Alumni SMK-PP ke luar negeri.

3.1.2.3.2.4. Peningkatan Ketenagaan Pendidikan Menengah Pertanian

Peningkatan Ketenagaan Pendidikan Menengah Pertanian meliputi kegiatan sebagai berikut:

- Standardisasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan di SMK-PP.
- Fasilitasi Sertifikasi Guru SMK PP dan tenaga kependidikan.

3.1.2.4. Dukungan Administrasi Manajemen dan Teknis Lainnya

Kegiatan administrasi manajemen dan teknis lainnya dalam mendukung Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani meliputi: pemantapan organisasi, ketatalaksanaan, pengelolaan kepegawaian dan ketatausahaan; pemantapan sistem perencanaan; pemantapan sistem pengelolaan keuangan dan perlengkapan; dan pemantapan sistem pengendalian, evaluasi, pelaporan, dan kehumasan. Dukungan Administrasi Manajemen dan Teknis lainnya dijabarkan sebagai berikut:

- 3.1.2.4.1. Pemantapan Organisasi, Ketatalaksanaan, Pengelolaan Kepegawaian dan Ketatausahaan difokuskan pada Penataan Organisasi dan Ketatalaksanaan serta Pengelolaan Administrasi Kepegawaian.
- 3.1.2.4.2. Pemantapan Sistem Perencanaan difokuskan untuk Peningkatan Kualitas Data, Perencanaan Program, Kegiatan dan Anggaran serta Kerjasama Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian.
- 3.1.2.4.3. Pemantapan Sistem Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan diarahkan pada Peningkatan kualitas pengelolaan administrasi keuangan dan barang milik negara.
- 3.1.2.4.4. Pemantapan Sistem Pengendalian, Evaluasi, Pelaporan, dan Kehumasan terdiri atas:
 - Pengembangan sistem pengendalian, evaluasi, dan pelaporan.
 - Pengelolaan kehumasan dan perpustakaan.

BAB IV.

PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Tahun 2012 merupakan suatu dokumen yang dipersyaratkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen ini merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis dan diakhiri dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Rencana Kinerja Tahunan ini merupakan rencana sebagai turunan dari rencana strategis yang berjangka waktu satu tahun. Rencana kinerja memberikan gambaran lebih mendetail mengenai sasaran dan strategis pencapaiannya. Dokumen ini memuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan. Indikator-indikator kinerja dari kegiatan berupa output dan indikator program berupa outcome ditentukan dalam dokumen ini sehingga diharapkan kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur capaian kerjanya. Pada tahun 2012 Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian melaksanakan Program Pengembangan SDM dan Kelembagaan Petani guna mencapai empat target sukses yang telah ditetapkan.

Disamping itu kemampuan menyusun rencana kinerja dan sasaran yang jelas dengan besaran yang terukur, lokasi, waktu, kelompok sasaran dan manfaat bagi kelompok sasaran. Kehadiran sistem anggaran terpadu berbasis kinerja akan membuka peluang bagi daerah untuk bekerja lebih optimal dan mencerminkan komitmen yang kuat dalam pelaksanaan sistem penganggaran terpadu berbasis kinerja dan berkerangka jangka menengah.

Kunci keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan terletak pada kemampuan menciptakan sinergisme dan keterpaduan pelaksanaan pembangunan melalui pematapan sistem dan metode perencanaan, peningkatan kualitas SDM, penataan kelembagaan dan peningkatan koordinasi antar instansi terkait. Dengan demikian hal-hal yang terkait dengan aspek potensi, tantangan dan hambatan dapat diselesaikan dengan baik.

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2012

PROGRAM PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN DAN KELEMBAGAAN PETANI

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN/INDIKATOR	TARGET SASARAN	ALOKASI ANGGARAN (Milyard Rp.)
	PROGRAM PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN DAN KELEMBAGAAN PETANI			1,419.37
		Meningkatkan kemampuan, kompetensi, kemandirian, dan daya saing SDM pertanian melalui program pengembangan SDM pertanian dan kelembagaan petani, untuk mendukung empat sukses pembangunan pertanian.		
		1. Meningkatnya kompetensi aparatur di sektor pertanian (orang)	24,443	
		2. Meningkatnya kapasitas non aparatur di sektor pertanian (orang)	22,205	
		3. Meningkatnya kinerja ketenagaan penyuluhan (orang)	55,458	
		4. Meningkatnya kapasitas aparatur fungsional pertanian (orang)	4,429	
		5. Tersedianya tenaga teknis menengah dan calon wirausahawan muda di sektor pertanian (orang)	16,248	
		6. Meningkatnya kapasitas kelembagaan Petani (unit)	51,763	
		7. Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintah (unit)	2,088	
1	Revitalisasi Pendidikan Pertanian ,Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian			169.30
		Meningkatkan kualitas SDM Pertanian melalui standardisasi dan sertifikasi profesi		
		1. Jumlah jenis profesi SDM Pertanian yang distandarisasi (SKKNI)	7	
		2. Jumlah penyuluh pertanian yang mendapat sertifikasi profesi (orang)	1,400	
		Meningkatkan kualitas kelembagaan pendidikan pertanian		
		1. Jumlah kelembagaan pendidikan yang ditingkatkan dan dikembangkan kualitasnya (unit)	6	
		2. Jumlah ketenagaan pendidikan kedinasan yang ditingkatkan kualitasnya (orang)	3180	
		Meningkatkan kualitas lulusan pendidikan pertanian (pendidikan kedinasan dan tugas belajar)		
		1. Jumlah tenaga fungsional yang mengikuti jenjang pendidikan kedinasan yang sesuai standar kompetensinya (orang)	2825	
		2. Jumlah aparatur yang mengikuti jenjang pendidikan formal S2 dan S3 (orang)	204	
		3. Jumlah dokumen perencanaan, keuangan, organisasi dan kepegawaian serta evaluasi dan pelaporan kegiatan revitalisasi pendidikan , standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian	107	
		4. Jumlah waktu pelaksanaan pelayanan perkantoran	12	
2	Pengembangan Pendidikan Menengah Pertanian			43.61
		Meningkatnya tingkat pendidikan menengah pertanian		
		1. Jumlah generasi muda pertanian yang difasilitasi melalui pendidikan di SMK-SPP (orang)	16,248	
		2. Jumlah kelembagaan pendidikan menengah pertanian (SMK-SPP) yang ditingkatkan kualitasnya (unit)	9	
		3. Jumlah ketenagaan pendidikan menengah pertanian (SMK-SPP) yang ditingkatkan kualitasnya (orang)	241	
		4. Jumlah dokumen perencanaan, keuangan, organisasi dan kepegawaian serta evaluasi dan pelaporan kegiatan pendidikan menengah(Dok)	59	
		5. Jumlah waktu pelaksanaan pelayanan perkantoran (bulan)	12	
3	Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian			375.19
		Meningkatkan kualitas dan kuantitas kelembagaan pelatihan pertanian		

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN/INDIKATOR	TARGET SASARAN	ALOKASI ANGGARAN (Milyard Rp.)
		1. Jumlah kelembagaan pelatihan UPT Pusat dan Daerah yang difasilitasi dan dikembangkan (unit)	29	
		2. Jumlah kelembagaan pelatihan milik petani (P4S) yang terbina dan terklasifikasi kelembagaannya (unit)	229	
		3. Jumlah ketenagaan pelatihan pertanian yang difasilitasi dan dikembangkan (orang)	1277	
		4. Jumlah dokumen perencanaan, keuangan, organisasi dan kepegawaian serta evaluasi dan pelaporan kegiatan pemantapan sistem pelatihan pertanian (Dok)	258	
		5. Jumlah waktu pelaksanaan pelayanan perkantoran (bulan)	12	
		Meningkatnya kualitas aparatur dan non aparatur pertanian		
		1. Jumlah aparatur pertanian yang ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan pertanian (orang)	23,166	
		2. Jumlah non aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya melalui pelatihan pertanian (orang)	22,205	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat di daerah tertinggal (READ Program)		
		1. Jumlah desa yang meningkat kapasitasnya (desa)	150	
4	Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang)			762.89
		Meningkatnya kualitas kelembagaan penyuluhan pertanian pemerintah		
		1. Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian pemerintah yang difasilitasi (Bakorluh, Bapeluh, BPP) (unit)	2044	
		Meningkatnya jumlah kelembagaan petani		
		1. Jumlah kelembagaan petani yang difasilitasi dan dikembangkan (gapoktan/poktan)(Unit)	51,534	
		Meningkatkan kualitas program dan materi penyuluh pertanian		
		1. Jumlah dokumen program, materi dan informasi pertanian yang dihasilkan dan disebarluaskan (judul)	4,369	
		2. Jumlah dokumen kegiatan pemantapan sistem penyuluhan pertanian (Dok)	247	
		Meningkatkan kualitas dan kuantitas ketenagaan penyuluh pertanian		
		1. Jumlah Ketenagaan penyuluhan pertanian yang difasilitasi (orang)	55,458	
		Meningkatkan mutu penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang dikelola oleh petani (FEATI)		
		1. Jumlah desa yang kegiatan penyuluhannya dikelola petani (desa)	772	
		2. Jumlah BPP yang dibangun dan direhab (unit)	0	
		3. Jumlah peralatan dan meubelair BPP (unit)	0	
5	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya			68.38
		Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi, dan manajemen organisasi PPSDMP melalui pemantapan sistem perencanaan, pengelolaan keu dan perlengkapan, monev serta ketatalaksanaan, kepegawaian dan ketatausahaan		
		1. Jumlah dokumen perencanaan, keuangan, organisasi dan kepegawaian, serta evaluasi dan pelaporan program penyuluhan dan pengembangan SDM Pertanian (Dok)	91	
		2. Jumlah waktu pelaksanaan pelayanan perkantoran (bulan)	12	